

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA ORDE BARU (1969-1998)

Oleh: Juhantika Anggraeni
(12407141021)

Abstrak

Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling cepat sehingga dikembangkan banyak negara termasuk Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis yang strategis dan banyaknya potensi wisata yang dimiliki. Pariwisata di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 1969 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai kebijakan pengelolaan pariwisata. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pariwisata, capaian, dan pengaruh pariwisata terhadap masyarakat di Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah DIY telah melakukan usaha pengelolaan pariwisata seperti penyusunan unit kawasan wisata serta membagi kelompok untuk prioritas pembangunan. Pariwisata menunjukkan pencapaian yang dapat dilihat dari adanya pengembangan objek wisata, pembangunan akomodasi dan transportasi, jumlah wisatawan, dan lain-lain (biro wisata, pemandu wisata, dan restoran). Berbagai perkembangan yang ada memberi dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak ekonomi meliputi pengaruh terhadap model perekonomian, pendapatan sub sektor pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja. Dampak sosial meliputi variasi cara hidup dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dampak budaya meliputi pengaruh pariwisata terhadap seni budaya berupa penyesuaian tampilan.

Kata Kunci: *Pariwisata, Yogyakarta, Orde Baru*

THE DEVELOPMENT OF TOURISM MANAGEMENT IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA DURING THE NEW ORDER (1969-1998)

By: Juhantika Anggraeni
(12407141021)

Abstract

Tourism is becoming one of the economic sectors which the most rapid growth that developed by many countries, including Indonesia. One of the areas in Indonesia which became a tourist destination is Province of Yogyakarta Special Region. This is inseparable from strategic geographical location and the number of its tourism potential. Tourism in Indonesia enters a new phase in 1969 when the central government issued a number of tourism management policy. Purpose of this writing is to know the policy of tourism management, achievement, and the influence of tourism to the people in Yogyakarta.

The result of this research indicate that the local government of Yogyakarta Special Region has made efforts to manage tourism such as drafting unit and split the group travel department for development priorities. Tourism represents a consider achievement that can be seen from the tourism object development, establishment of accommodation and transportation, the number of tourist, etc. (tourist agency, tour guide, and restaurant). Various developments have impacts in the economic, social, and cultural. Economic impact includes the impact of economy model, tourism sub-sector revenue, and employment. Social impact includes variations in the way of life and changing values in society. Cultural impact includes influence on art and culture in the form of adjustments views.

Key Word: *Tourism, Yogyakarta, New Order*

A. Pendahuluan

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan individu maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan.¹ Pariwisata berkembang dengan pesat di berbagai negara dan menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi negara-negara yang mengelola sektor kepariwisataannya. Potensi wisata yang dimiliki dapat

¹ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 21.

dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian untuk menghasilkan devisa yang sifatnya *quick yielding*². Salah satu negara yang memprioritaskan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan adalah Indonesia.

Di Indonesia pariwisata sudah mulai dikembangkan sejak masa Kolonial. Pengembangan pariwisata jika dilihat dari segi kelembagaan formal mulai dirintis dengan dibentuk Hotel Negara dan Tourisme (Honet) dalam lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 1947. Usaha tersebut dilanjutkan pada tahun 1955 dengan mendirikan Yayasan Tourisme Indonesia dan PT. National Hotel and Tourisme Corp. Ltd (Natour).³ Tahun 1957 Musyawarah Nasional Tourisme I di Bogor menghasilkan terbentuknya Dewan Tourisme Indonesia menggantikan Yayasan Tourisme Indonesia. Pada tahun 1960 Dewan Tourisme Indonesia menjadi Dewan Pariwisata Indonesia. Tidak lama berselang pada tahun 1966 pemerintah membentuk Departemen Pariwisata dan dalam masa ini didirikan pula PT. Hotel Indonesia Internasional dan PT. Hotel Nasional Indonesia yang merupakan wadah untuk mempersatukan hotel baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Setelah Departemen Pariwisata ditiadakan, pemerintah membentuk badan baru dengan nama Lembaga Kepariwisataan Republik Indonesia (GATARI) dan kembali diganti dengan Lembaga Pariwisata Nasional (LPN).⁴

² Oleh para pakar, Industri pariwisata disebut sebagai "*Quick Yielding Industri*" karena dengan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, devisa (*foreign-exchanges*) akan lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional. Seperti diketahui bahwa pemerintah harus mencari alternatif sektor ekonomi yang dianggap pas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu sektor ekonomi yang dianggap cukup prospektif adalah sektor pariwisata. Lihat Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 14.

³ Yayasan Tourisme Indonesia merupakan suatu lembaga non komersial, sedangkan PT. Natour yang didirikan oleh Bank Industri Negara merupakan badan usaha yang bersifat komersial dan bersama Biro Tourisme Kementerian Perhubungan memikirkan dan menangani pelaksanaan pengembangan pariwisata di Indonesia. James J. Spillane, *op.cit.*, hlm. 64.

⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

Pada tahun 1969 Pemerintah Pusat mengeluarkan Keppres Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisata Nasional. Keduanya merupakan dasar penting dalam perkembangan pengelolaan pariwisata di Indonesia. Salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Gambaran Umum Pariwisata di Yogyakarta

Yogyakarta merupakan daerah administratif yang kedudukannya setingkat dengan Daerah Tingkat I atau provinsi. Yogyakarta adalah provinsi di Indonesia yang menyandang status sebagai sebuah daerah istimewa sehingga disebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta disebut istimewa karena sebelum bergabung dengan Republik Indonesia (RI) sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri atau susunan asli.⁵ Status istimewa secara substansi sebenarnya tidak berbeda dengan status ekonomi khusus. Kaitannya dengan desentralisasi, pemerintah nasional memberikan pengakuan terhadap keberagaman budaya, asal-usul, dan pengalaman sejarah.⁶

Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 3.185,80 km² terbagi atas 4 kabupaten dan 1 kotamadya yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kotamadya Yogyakarta. Letak Yogyakarta sangat strategis karena berada diantara lintasan DTW utama yaitu DKI Jakarta dan Bali. Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang merupakan tempat transit antar kota besar di Pulau Jawa. DTW utama lainnya antara lain

⁵ Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16.

⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 41.

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang relatif dekat jika dijangkau dari Yogyakarta.⁷

Sampai dengan tahun 1960 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Tourisme Jogjakarta, sudah ada 23 objek tourisme di Yogyakarta. Objek-objek tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kotamadya di Yogyakarta kecuali Kabupaten Kulon Progo.⁸ Akomodasi dan transportasi yang ada saat itu masih terbatas dan berbagai usaha untuk mengembangkan wisata sudah dilakukan seperti penyelenggaraan paket wisata.

C. Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Dan Perkembangannya Di Yogyakarta

Keppres No. 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional. Keputusan ini dibuat pada tanggal 22 Maret 1969 dan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 merupakan kebijakan awal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mulai memiliki wewenang yang lebih luas dalam usaha pengelolaan pariwisata setelah dikeluarkan PP No. 24 tahun 1979. PP tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Berdasarkan PP tersebut, ada 12 urusan kepariwisataan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, yaitu Objek Wisata, Pramuwisata, Losmen, Penginapan Remaja, Perkemahan, Rumah Makan, Bar, Mandala Wisata, Usaha Kawasan Pariwisata, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, serta Promosi Pariwisata Daerah.⁹

⁷ Ilmiawati Safitri, "Bisnis Perbioskopon di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm. 31.

⁸ BPAD DIY, Jawatan Pemerintahan Umum, No. 3218, *Daftar Objek-objek Tourisme di DIY*, 1960.

⁹ Dinas Pariwisata Provinsi DIY, *Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahap II (Pengembangan)*, (Yogyakarta: Proyek Pengembangan Penyuluhan dan Perencanaan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 1988), hlm. II-34.

Usaha Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan pariwisata ialah menyusun unit kawasan wisata Yogyakarta yang terbagi dalam 5 sub DTW yaitu sub DTW wilayah kota dan sekitarnya, sub DTW wilayah Kabupaten Dati II Bantul, sub DTW Kabupaten Dati II Kulon Progo, sub DTW Kabupaten Dati II Gunung Kidul, dan yang terakhir sub DTW wilayah Kabupaten Dati II Sleman. Objek-objek wisata Yogyakarta juga dikelompokkan menjadi 7 unit kawasan wisata fungsional.¹⁰ Pemerintah menyusun jenis-jenis paket wisata yang dikaitkan dengan tingkat pengembangan objek-objek wisata di Yogyakarta. Terdapat tiga konsep paket wisata yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.¹¹

Pembinaan urusan pariwisata yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai pelaksana. Di Dati II belum dibentuk Cabang Dinas sehingga melibatkan unit-unit Pemerintah Daerah di Tingkat II seperti Badan Perekonomian atau bagian Kesra dan Biro Pembangunan atau BAPPEDA Tingkat II. Hal ini karena pembentukan lembaga-lembaga yang ada memiliki banyak tahapan dan perlu kajian matang.

D. Pengaruh Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Yogyakarta

Pengaruh pariwisata terhadap kehidupan masyarakat Yogyakarta dapat dilihat dari pencapaian dan dampak pariwisata. Capaian pariwisata di Yogyakarta dapat dianalisis dari beberapa indikator seperti adanya pengembangan objek wisata, pembangunan akomodasi dan transportasi, jumlah wisatawan, dan lain-lain. Dampak pariwisata dapat dilihat dari banyak aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya karena pariwisata adalah sektor yang memiliki banyak keterkaitan dengan sektor lain.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY sampai tahun 1998 sudah ada lebih dari 68 objek wisata yang tersebar di seluruh kabupaten dan

¹⁰ *Penyempurnaan Buku Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Penyusunan Rencana Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: P4N UGM), hlm. 34-36.

¹¹ Dinas Pariwisata Provinsi DIY, *op.cit.*, hlm. V-15 – V-17.

kotamadya Provinsi DIY. Jumlah pengunjung objek-objek wisata tersebut pada tahun 1998 mencapai 3.762.114 wisatawan yang terdiri dari 186.964 wisatawan mancanegara dan 3.575.150 wisatawan nusantara.¹² Beberapa objek wisata yang menjadi andalan tujuan wisata baik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara ialah Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, dan Purawisata.

Pertumbuhan hotel bintang banyak di Kabupaten Sleman dan Kotamadya Yogyakarta karena kedua wilayah ini merupakan wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. Di luar wilayah ini juga dibangun akomodasi dalam klasifikasi yang lebih rendah yakni berupa akomodasi melati dan pondok wisata. Penyebarannya kedua jenis akomodasi ini lebih merata yakni ada diseluruh wilayah Yogyakarta meskipun secara kuantitas tetap lebih banyak di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Transportasi semakin berkembang dengan penambahan jumlah dan mulai adanya transportasi khusus bagi wisatawan.

Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang banyak mendapat kunjungan wisatawan. Pariwisata di Yogyakarta ditandai dengan pencapaian target tahun 1991 yang berhasil menjaring wisatawan mancanegara sekitar 191.000 dengan devisa sebanyak 171, 9 juta dollar AS. Meskipun demikian, pengembangan wisata di Yogyakarta tidak hanya diprioritaskan pada wisatawan mancanegara dan kalangan atas, tetapi juga tidak mengesampingkan wisatawan nusantara yang tergolong kalangan bawah.¹³

Meskipun tidak secara signifikan, sejak 1986 hingga 1993 terjadi kecenderungan peningkatan prosentase PDRB pada beberapa sektor yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata. Data yang ada juga didukung dengan kenyataan di lapangan berupa mulai dikembangkannya usaha-usaha di bidang pariwisata meskipun pariwisata tidaklah dijadikan usaha primer bagi sebagian masyarakat. Pada umumnya

¹² Diolah dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY, *Statistik Pariwisata Tahun 1998 Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1999, hlm. 3-6.

¹³ “Target Turis Asing di DIY tahun 1992, 220.000 orang”, *Bernas*, 13 Januari 1992.

masyarakat masih memiliki pekerjaan utama dan usaha dibidang pariwisata dijadikan pekerjaan sampingan. Peranan pariwisata juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja.¹⁴ Semakin bertambahnya jumlah usaha di bidang pariwisata mengakibatkan permintaan tenaga kerja pada sektor tersebut semakin meningkat. Berkembangnya pariwisata memberi kesempatan pada munculnya hotel-hotel, toko-toko penjual cinderamata, hal itu memberi peluang dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja tidak harus karena adanya hotel-hotel dan restoran, tetapi dapat pula diusahakan masyarakat sekitar objek wisata itu sendiri. Peranan pariwisata secara riil dapat dilihat dari pendapatan sub sektor pariwisata Provinsi DIY. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I DIY yang ada dalam Statistik Pariwisata Tahun 1998 DIY, sub sektor dengan pendapatan paling tinggi adalah pajak pembangunan terutama pada tahun 1996.

Dampak sosial terlihat dari adanya variasi cara hidup masyarakat seperti yang terjadi pada masyarakat Parangtritis dan Prawirotaman. Di Desa Parangtritis, masyarakat yang biasanya bertani mulai mengembangkan potensi wisata di wilayahnya tanpa meninggalkan pekerjaannya. Di Prawirotaman, munculnya ide usaha penginapan dipicu kebutuhan tempat penginapan dan dibarengi dengan digalakkannya pariwisata di Yogyakarta serta setelah berbagai usaha pasca mundurnya usaha batik tidak mampu berkembang.¹⁵ Usaha perhotelan berjalan secara bertahap, tidak terjadi secara bersamaan.¹⁶ Permasalahan yang merupakan dampak sosial adalah adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat seperti yang terjadi di Kampung Taman terkait bahasa. Perubahan nilai juga terjadi di masyarakat sekitar kawasan Parangtritis dan Pasar Kembang (Sarkem) terkait kegiatan prostitusi.

¹⁴ I Gde Pitana dan Putu G. Gayanti, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 112.

¹⁵ Sumintarsih dan Ambar Adrianto, *Dinamika Kampung Kota Prawirotaman Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, (Yogyakarta: Balai Pelestari Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2014), hlm. 101-102.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

Komersialisasi seni budaya dalam pariwisata menjadi isu utama dalam pembahasan dampak budaya. Bentuk komersialisasi seni budaya itu tidak hanya terjadi dalam kesenian daerah saja, tetapi meliputi semua sektor yang banyak kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan, seperti misalnya seni patung, seni lukis, seni membatik, seni pahat, dan banyaknya kerajinan lainnya yang sering menjadi incaran para wisatawan.¹⁷ Pengaruh yang ada muncul hanya sebatas pada teknik penyampaian atau teknik penyelenggaraannya dan penggarapannya. Alasannya yaitu waktu tinggal para wisatawan yang pendek sehingga kontak dan interaksi budaya dengan masyarakat setempat terbatas dan tidak saling mempengaruhi selera para wisatawan. Tegasnya dampak pariwisata terhadap kesenian adalah munculnya produk-produk seni kemasan atau seni wisata dalam format kecil atau padat yang tidak mengganggu akar budaya yang telah ada.¹⁸

E. Kesimpulan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang strategis secara geografis dan memiliki banyak potensi wisata. Tahun 1969, Pemerintah Pusat mulai banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata. Pemerintah Pusat kemudian menyerahkan sebagian urusan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Ada 12 urusan kepariwisataan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Wujud pengelolaan objek wisata di Yogyakarta ialah penyusunan unit kawasan wisata yang terbagi dalam 5 kawasan secara administratif dan 7 kawasan wisata fungsional serta menentukan prioritas pembangunan objek wisata. Pembinaan

¹⁷ Oka A. Yoeti, *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 14.

¹⁸ Gatut Murniatmo, dkk., *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 139-140.

urusan pariwisata yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai pelaksana.

Capaian pariwisata di Yogyakarta dapat dilihat dari adanya pengembangan objek wisata, pembangunan akomodasi dan transportasi, jumlah wisatawan, dan lain-lain. Pariwisata di Yogyakarta dan perkembangannya membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata bersifat lintas sektoral yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak bidang ekonomi meliputi dampak pariwisata kaitannya dengan model perekonomian suatu daerah, pendapatan sub sektor pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja. Dampak sosial kaitannya dengan pengaruh pariwisata terhadap variasi cara hidup dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dampak budaya kaitannya dengan penyesuaian tampilan seni budaya di Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Arsip:

BPAD DIY, Jawatan Pemerintahan Umum, No. 3218, *Daftar Objek-objek Tourisme di DIY*, 1960.

Dinas Pariwisata Provinsi DIY, *Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahap II (Pengembangan)*, Yogyakarta: Proyek Pengembangan Penyuluhan dan Perencanaan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 1988.

Dinas Pariwisata Provinsi DIY, *Statistik Pariwisata Tahun 1998 Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1999.

Buku:

Gatut Murniatmo, dkk., *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

I Gde Pitana dan Putu G. Gayanti, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI, 2005.

Oka A. Yoeti, *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1987.

_____, *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta: Kompas, 2008.

Penyempurnaan Buku Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Penyusunan Rencana Peraturan Daerah, Yogyakarta: P4N UGM.

Spillane, James J., *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Sumintarsih dan Ambar Adrianto, *Dinamika Kampung Kota Prawirotaman Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, Yogyakarta: Balai Pelestari Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2014.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Surat Kabar:

Bernas, 13 Januari 1992.

Skripsi:

Ilmiawati Safitri, "Bisnis Perbioskopian di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2015.

Pembimbing



HY. Agus Murdiyastomo, M. Hum
NIP. 19580121 198601 1 001

Yogyakarta, ^{15 Juli}.....2016
Mengetahui
Reviewer



Drs. Djumarwan
NIP. 19560101 198502 1 001